

TPP Harlep akan Dilaporkan

KP2KKN Punya Bukti, Rawan Dikorupsi

SEMARANG- Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemrov Jateng kepada tenaga harian lepas (Harlep) pada tahun 2013 dan 2014 bakal berbuntut panjang. Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng akan melaporkan masalah tersebut kepada aparat hukum terkait.

"Kami akan laporkan dugaan pelanggaran pemberian TPP kepada tenaga Harlep yang dilakukan Pemprov Jateng ke aparat penegak hukum. Aturannya jelas, TPP itu untuk PNS. Ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.58/2005. Tapi di pemprov pada tahun 2013 dan 2014, tenaga Harlep juga mendapatkan TPP," ungkap Sekretaris KP2KKN Eko Haryanto, Minggu (11/1). Rencana pelaporan itu sangat

"Jumlah Harlep selama ini tidak ada angka pasti. Saya curiga, ini menjadi ajang manipulasi, yang ujung-ujungnya adalah korupsi,"

Eko Haryanto
Sekretaris KP2KKN Jateng

serius. Karena persoalan TPP ini, selain menyangkut pengelolaan keuangan yang sangat besar, yaitu mencapai Rp 800 miliar



lebih pada tahun 2014, juga menyangkut asas keadilan dan kepatutan masyarakat.

K P 2 K K N sekarang ini sedang melakukan investigasi data pemberian TPP kepada tenaga Harlep. Apalagi di beberapa media sudah ada berita pengakuan dari beberapa Harlep yang mendap-

atkan TPP.

"Saya kira yang dimuat di media massa selama ini sudah sangat gamblang. Ada TPP untuk Harlep pada tahun 2013 dan 2014. Mereka mengaku dapat Rp 1,7 juta pada tahun 2013 dan Rp 3 juta per bulan pada tahun 2014," katanya.

Pengakuan dari tenaga Harlep juga dikuatkan pengakuan Sekda Jateng Sri Puryono dan Kepala Biro Keuangan Arif Sambodo.

"Kedua pejabat teras itu juga mengakui adanya pemberian TPP pada Harlep pada 2013 dan 2014," tegasnya.

■ Baca TPP ...hal 7

TPP

Apa yang dilakukan Pemprov dengan memberikan TPP pada Harlep itu merupakan kebijakan yang sangat ngawur. Sebab, tidak ada landasan hukumnya.

Eko curiga, anggaran TPP kepada Harlep, menjadi salah satu ajang KKN. Sebab, jumlah Harlep selama ini juga tidak ada angka pasti. "Saya curiga, ini menjadi ajang manipulasi, yang ujung-ujungnya adalah korupsi," tegasnya.

Lalu kepada aparat mana persoalan TPP ini akan dilaporkan? Eko Haryanto

belum memastikan persoalan TPP akan dilaporkan ke aparat penegak hukum yang mana. Apakah kepolisian, kejaksaan atau KPK.

"Belum kita pastikan mas. Bisa ke kepolisian, kejaksaan atau KPK langsung. Kalau nanti kira-kira di kepolisian atau Kejati Jateng tidak akan maksimal penanganannya, maka kami akan langsung lapor ke KPK," tegasnya.

"Apalagi menyangkut anggaran TPP tahun 2015, yang mencapai Rp 1,1 triliun, dalam evaluasinya

Mendagri juga menyatakan terlalu besar. Bahkan jumlah PNS dengan anggaran yang disediakan juga dianggap tidak sebanding," bebernya.

Pernyataan yang sama sebelumnya disampaikan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) H Boyamin Saiman. Ia meminta BPK RI Perwakilan Jateng untuk mengaudit anggaran TPP pemprov Jateng tahun 2014.

"TPP itu kan untuk PNS. Saya minta BPK harus segera mengaudit anggaran TPP di

pemprov Jateng," ujarnya. Apa yang dilakukan pemprov Jateng itu tidak masuk akal sama sekali. "Masak harlep yang gajinya Rp 1,4 juta dapat TPP-nya Rp 3 juta," katanya.

Diketahui, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng, Dr Cris Kuntadi menyampaikan, masalah kepatutan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Pemprov Jateng merupakan hal nisbi. Ada yang bilang patut, tapi ternyata tidak patut.

"Saya sempat di BBM

wartawan. Ditanya apakah TPP di Pemprov Jateng Rp 1,1 triliun itu patut apa tidak. Saya menjawab no comment Pak Gub (Gubernur-red)," ungkapnya.

Pernyataan itu disampaikan Cris Kuntadi saat memberikan sambutan pada acara penyerahan Dokumen Pelaksanaan APBD (DPA) Alokasi Bankeu Kepada Kab/Kota dan Pemdes serta alokasi hibah daerah Provinsi Jateng TA 2015 di Gradika Bhakti Praja, Kantor Gubernur, belum lama ini. (udi/muz)

dari hal 1